

KONDISI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA MENGHADAPI
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Disusun guna memenuhi Ujian Akhir Semester Mata Kuliah
Sistem Administrasi Kesatuan Republik Indonesia
(SANKRI)



Disusun Oleh :

Rizka Nur Amalia

14020113140109

Administrasi Publik

kelas 03

ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM SANKRI

Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) adalah administrasi negara sebagai sistem yang dipraktekkan untuk mendukung penyelenggaraan NKRI agar upaya Bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Sistem administrasi negara pada suatu negara memiliki keunikan tertentu. Bagi Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang berbentuk republik yang demokratis dan konstitusional maka yang berlaku adalah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia(SANKRI) dan berperan sebagai sistem penyelenggara kebijakan negara. Dalam eksistensinya sebagai sistem dan sesuai dengan konstitusi negara yang mendasarinya, SANKRI pada dasarnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur nilai

Unsur Nilai meliputi landasan atau dasar negara yaitu Pancasila, cita-cita dan tujuan negara, serta nilai dan prinsip yang terkandung dalam bentuk negara dan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

b. Unsur Struktur

merupakan tatanan kelembagaan yang terbentuk dalam kehidupan NKRI yang demokratis dan konstitusional berupa tatanan organisasi pemerintahan negara dan organisasi yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat bangsa.

c. Unsur Proses

Unsur Proses tercermin dalam berbagai kegiatan manajerial dan saling hubungan antar lembaga negara. Menurut Mustopadidjaja (2003), strategi dan program aksi yang terarah pada proses pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan dalam rangka SANKRI memerlukan suntikan aktivitas, padapokoknya meliputi aktualisasi tata nilai, penyesuaian struktur, proses dan kualitas sumber daya aparatur. Semua itu dikembangkan dalam rangka mengemban perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan NKRI, terwujudnya pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas KKN.

Peningkatan Kompetensi SDM Dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, sesuai dengan sistem pemerintah negara berlandaskan Undang-Undang dasar 1945 penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui SANKRI. Dengan demikian, SANKRI dapat dirumuskan sebagai keseluruhan tatanan organisasi dan proses manajemen dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa guna mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan yang diamanatkan dalam konstitusi negara.

Sebagai suatu sistem maka sistem administrasi negara republik indonesia terdiri dari berbagai subsistem seperti, sistem manajemen, sistem kepemimpinan, sistem birokrasi, sistem pelayanan dan sistem keuangan. Keseluruhan sistem ini berimbas pada terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme di indonesia. Indonesia dituding sebagai negara yang paling lemah sumber daya manusianya, paling lemah mata uangnya, paling lemah peradaban moralnya.

Di samping itu SANRI juga berinteraksi dengan ilmu-ilmu kenegaraan lainnya seperti ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu hukum tata negara dan ilmu negara sendiri.

1.2 PERMASALAHAN

Rendahnya kualitas tenaga kerja

Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa.

Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja

Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi.

Masyarakat Ekonomi ASEAN

MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) atau AEC (Asean Economic Community) adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Tujuan dibentuknya “Komunitas Ekonomi ASEAN” tidak lain untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. MEA 2015 bisa mendatangkan keuntungan yang besar bagi Indonesia. Namun, juga dapat menimbulkan kerugian yang besar pula. Kerugian yang akan dihadapi adalah terancamnya daya saing tenaga kerja Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang kurang terdidik di Indonesia masih tinggi. Hal ini mengkhawatirkan karena bisa saja tenaga kerja negara tetangga mengambil alih lapangan kerja di Indonesia akibat Tenaga Kerja Indonesia yang tidak dapat bersaing dengan Tenaga Kerja Luar Negeri.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja disebut juga golongan produktif. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

Bukan tenaga kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela.

2.2 Keterkaitan Kondisi Tenaga Kerja di Indonesia dengan adanya MEA 2015

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke empat terbesar didunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sedangkan

negara kelima yang memiliki penduduk terbesar adalah Jepang. Indonesia dengan jumlah penduduk 237.641.326 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia. Tentu saja hal ini menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya manusia atau tenaga kerja yang melimpah, yang bisa disalurkan untuk mempercepat proses pembangunan Indonesia. Sumber daya manusia yang melimpah dan didukung oleh sumber daya alam yang juga melimpah merupakan modal yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dari negara lain yang lebih maju dan makmur. Hal ini bisa terwujud kalau pengelolaan SDM dan SDA tadi terlaksana dengan baik, adanya keseimbangan antara pendidikan/skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja.

Masalah akan timbul, apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang ada. Dengan kata lain lapangan kerja yang ada tidak mampu menampung (mempekerjakan) tenaga kerja yang ada, lebih-lebih tenaga kerja yang tidak terampil atau berpendidikan. Masalah ini akan menyebabkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin juga semakin besar dan memiliki efek-efek negatif yang lain pula.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (february 2014) menyatakan bahwa Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2014 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 55,3 juta orang (46,80 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 21,1 juta (17,82 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 12,0 juta orang mencakup 3,1 juta orang (2,65 persen) berpendidikan Diploma dan sebanyak 8,8 juta orang (7,49 persen) berpendidikan Universitas. Kondisi seperti ini merupakan sebuah tantangan yang besar 2015 terkait dengan datangnya MEA 2015. MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) atau AEC (Asean Economic Community) adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Tujuan dibentuknya “Komunitas Ekonomi ASEAN” tidak lain untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Dengan diimplementasikannya MEA 2015, Indonesia mempunyai 2 pilihan, menjadi aktor utama atau hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Dengan kata lain, MEA 2015 bisa mendatangkan keuntungan yang besar bagi Indonesia yaitu terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai

kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun, juga dapat menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian lain yang akan dihadapi adalah terancamnya daya saing tenaga kerja Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang kurang terdidik di Indonesia masih tinggi yakni mereka yang berpendidikan di bawah SD dan SMP mencapai 68,27 persen atau 74.873.270 jiwa dari jumlah penduduk yang bekerja sekitar 110.808.154 jiwa. 80 persen pengangguran Indonesia hanya lulusan SMP dan SD. Mayoritas tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar dan lebih banyak bekerja pada sektor informal

Hal ini mengkhawatirkan karena bisa saja tenaga kerja negara tetangga mengambil alih lapangan kerja di Indonesia. Dalam hal ini dapat memunculkan juga risiko ketenagakarejaan bagi Indonesia apabila tenaga kerja di Indonesia tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja luar negeri, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah lapangan kerja di Indonesia dikuasai oleh tenaga kerja luar yang lebih kompeten. Dengan adanya MEA 2015 ini liberalisasi di bidang barang dan jasa akan terjadi antar negara ASEAN, Liberalisasi di bidang jasa yang menyangkut sumber daya manusia mungkin akan tampak terlihat jelas karena menyangkut tentang penempatan tenaga terampil dan tenaga tidak terampil dalam mendukung perekonomian negara. Namun, yang paling banyak berpengaruh dan sangat ditekan dalam Masyarakat Ekonomi Asean adalah tenaga kerja terampil. Namun, rendahnya tingkat pendidikan pada 72% tenaga kerja Indonesia mengakibatkan sulitnya bagi kelompok masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan tingkat keterjaminan yang relatif lebih baik. Hanya sebagian kecil (8%) dari komposisi tenaga kerja Indonesia yang berdaya saing, 3% di antaranya merupakan profesional dengan tingkat pendidikan minimal sarjana, sedangkan 5% di antaranya merupakan tenaga kerja dengan pendidikan diploma dan kejuruan. Keadaan itu tentunya menjadi kegelisahan yang cukup mengganggu dalam menyongsong pasar tunggal ASEAN ketika arus liberalisasi jasa termasuk jasa profesi baik tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja tidak terampil akan semakin meningkat mendekati 2015. Tugas pemerintah adalah mempersiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing agar mampu bersaing dengan tenaga kerja luar. Kualitas tenaga kerja yang tinggi akan hadir apabila kualitas pembangunan manusia Indonesia berdaya saing unggul. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, gizi, dan fasilitas publik lainnya akan menentukan kualitas manusia dan tenaga kerja

Indonesia. Peningkatan mutu tenaga kerja merupakan persiapan yang harus dilakukan agar Indonesia tidak mengalami kerugian yang besar di MEA 2015 mendatang.

BAB III

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja

di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rendahnya pendidikan dan penguasaan teknologi ini merupakan sebuah ancaman besar bagi Indonesia terkait dengan adanya masyarakat ekonomi asean 2015(MEA). MEA 2015 bisa mendatangkan keuntungan yang besar bagi Indonesia yaitu terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun, juga dapat menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian lain yang akan dihadapi adalah terancamnya daya saing tenaga kerja Indonesia. apabila tenaga kerja di Indonesia tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja luar negeri, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah lapangan kerja di Indonesia dikuasai oleh tenaga kerja luar yang lebih kompeten. Peningkatan mutu tenaga kerja merupakan persiapan yang harus dilakukan agar Indonesia tidak mengalami kerugian yang besar di MEA 2015 mendatang.

4.2 Rekomendasi

Peningkatan mutu tenaga kerja merupakan persiapan yang harus dilakukan agar Indonesia tidak mengalami kerugian dalam MEA 2015 mendatang. Langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi MEA 2015 adalah:

- a.) Penduduk usia kerja yang masih memiliki pendidikan rendah perlu di tingkatkan kualitasnya melalui pelatihan yang sesuai dengan keunggulan di wilayahnya masing-masing. Seperti sektor pertanian, perlu mendapatkan pelatihan keterampilan dibidang pertanian dan perikanan sehingga tenaga kerja di Indonesia mempunyai keahlian khusus dan mampu menggunakan teknologi yang memadai dan dapat bersaing dengan negara luar. Dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan guna mendukung daya saing dan peningkatan nilai tambah sektor pertanian.
- b.) Memberikan Pelatihan berupa kursus bahasa Inggris dan teknologi secara gratis, agar nantinya tenaga kerja Indonesia terdidik dan terlatih serta mempunyai kemampuan berbahasa dan ilmu teknologi sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja lain dari berbagai negara.
- c.) Memberikan kompetensi khusus/keahlian khusus kepada tenaga kerja Indonesia kemudian memberikan sertifikasi profesi kepada tenaga kerja

tersebut sebagai bukti bahwa tenaga kerja tersebut telah terdidik dan terlatih.

- d.) Mengembangkan UMKM di Indonesia agar produk-produknya dapat dipasarkan secara global dan bersaing dengan produk negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Syafii, Inu Kencana (2003). Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANRI). Jakarta: PT Bumi Aksara

<http://suaramahasiswa.com/mea-2015-ajang-kompetisi-kualitas-tenaga-kerja/>

[http://www.academia.edu/6729063/PELUANG DAN TANTANGAN UKM INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015](http://www.academia.edu/6729063/PELUANG_DAN_TANTANGAN_UKM_INDONESIA_MENGHADAPI_MASYARAKAT_EKONOMI_ASEAN_2015)

UU No. 13 tahun 2003

<http://www.scribd.com/doc/106899329/Resume-Modul-1-3-SANKRI#scribd>